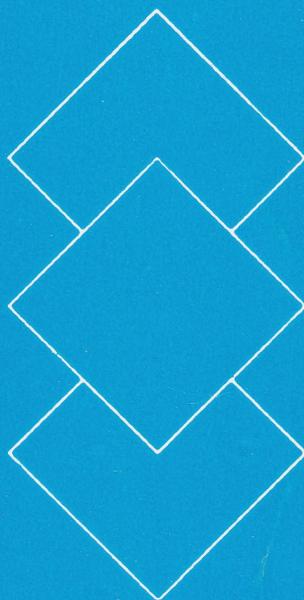


VOLUME 13, NOMOR 1, APRIL 2011

ISSN 1410-9883

# CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH  
DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN



ISSN 1410-9883

**CAKRAWALA PENDIDIKAN**  
**Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan**

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober  
Terbit pertama kali April 1999

**Ketua Penyunting**

Kadeni

**Wakil Ketua Penyunting**

Syaiful Rifa'i

**Penyunting Pelaksana**

R. Hendro Prasetyanto

Udin Erawanto

Riki Suliana

Prawoto

**Penyunting Ahli**

Miranu Triantoro

Masruri

Karyati

Nurhadi

**Pelaksana Tata Usaha**

Yunus

Nandir

Sunardi

**Alamat Penerbit/Redaksi:** STKIP PGRI Blitar, Jalan Kalimantan No. 49 Blitar, Telepon (0342)801493. Langganan 2 nomor setahun Rp 10.000,00 ditambah ongkos kirim Rp 3.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

**CAKRAWALA PENDIDIKAN** diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua:** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua:** M. Khafid Irsyadi, ST., S.Pd

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Pe-tunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

**CAKRAWALA PENDIDIKAN****Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan**

Volume 13, Nomor 1, April 2011

**Daftar Isi**

Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan .....	1
<i>Abd. Jabar Abdul</i>	
Kepemimpinan dan Organisasi .....	15
<i>Kadeni</i>	
Model-model Pembelajaran yang Inovatif dan Menyenangkan .....	29
<i>Lulus Priyoananto</i>	
Pendidikan Kewarganegaraan ( <i>Civic Education</i> ) dan Misi Membentuk Kepribadian Bangsa .....	44
<i>M. Syahri</i>	
Menciptakan Suasana Belajar Berdasarkan Prinsip-prinsip Belajar Andragogi: Sebuah Renungan Refleksi Pendidikan Non Formal .....	58
<i>Miramu Triantoro</i>	
Pengembangan Budaya Organisasi Sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru di Sekolah .....	65
<i>Ninik Srijani</i>	
Appositive Clauses in English Syntax .....	83
<i>R. Hendro Prasetianto</i>	
TEaching Speaking Based on Procedure Text Using Counseling-learning Approach for Beginners .....	94
<i>Saiful Rifai</i>	
The Significance of Pragmatic Awareness in the Teaching of Exchanges .....	99
<i>Saptaria Laksanawati</i>	
Pengaruh Pemberian Tugas Resume dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar .....	111
<i>Sunarno</i>	
Pemanfaatan Teknologi Multimedia dalam Pembelajaran Matematika .....	127
<i>Tatiek Ismiasri</i>	
Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif ( <i>Jigsaw</i> dan <i>STAD</i> ) dan Pengetahuan Awal terhadap Prestasi Belajar Matakuliah Belajar dan Pembelajaran .....	142
<i>Agus Budi Santosa</i>	

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (*CIVIC EDUCATION*) DAN MISI MEMBENTUK KEPRIBADIAN BANGSA

M. Syahri

**Abstrak :** Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*.” Dalam konteks ini peran PKn bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokrasi pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk jabatan publik. (Udin S. Winataputra & Dasim B. *Civic Education*, 2007, h.i). Tujuan PKn adalah Terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh tanggung jawab Dalam urusan-urusan publik, diperlukan sepe-rangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual dan keterampilan berperan serta. Keterampilan ini pda gilirannya ditingkatkan lebih lanjut melalui Pengembangan watak yang dapat meningkatkan kemampuan individu Warga negara berperan serta dalam proses politik, yang selanjutnya dapat mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat. Dengan demikian PKn berfokus pada tiga komponen dasar Pengembangan, yaitu; pengetahuan, keterampilan, dan watak atau Karakter kewarganegaraan (Udin S.W. & Dasim, 2007, h. 1).

**Keywords :** Pendidikan Kewarganegaraan, civic education, nation and character building

---

M.Syahri adalah dosen Pendidikan Kewarganegaraan pada jurusan Civic Hukum /PPKn, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang.

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subyek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “nation and character building”. Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, ketrampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. (Udin S&Dasim B, 2007). Hampir semua negara di dunia dewasa ini telah memandang pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana *nation and character building* yang tidak dapat dilepaspisahkan dari bidang studi sosial lainnya yang harus diajarkan secara multidisipliner mulai dari Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi, dengan maksud untuk mengembangkan pengetahuan dan kepribadian siswa-mahasiswa untuk menjadi warga negara yang memiliki wawasan yang luas (*learning to know*), kemampuan berbuat (*learning to do*), kemampuan untuk hidup dan berkehidupan (*learning to be*), dan berkemampuan untuk hidup harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*learning to live together*) (UNESCO: 1996 dalam Winataputra, 2006: 19).

CEPS sebagai Sebuah jaringan penelitian Internasional yang dirancang untuk mengkaji; Perubahan Karakter Kewarganegaraan untuk lebih dari 25 tahun mendatang beserta inflikasinya terhadap perubahan kebijakan pendidikan pada sembilan negara yang terlibat dalam kegiatan itu serta negara-negara lainnya, sejak 1991. Lembaga yang diketuai Prof. DR. John Cogen (1998) menjelaskan bahwa; *a citizen* berarti anggota resmi suatu masyarakat, dan *citizenship* berarti seperangkat karakteristik sebagai seorang warga negara, sedangkan *citizenship education* berarti kontribusi atau dampak pendidikan terhadap pengembangan karakteristik yang menandai seorang warga negara.

Cogen menjelaskan sedikitnya terdapat lima atribut pokok atau ciri utama citizenship/warga negara yaitu, jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, serta pemilihan nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Kelima atribut tersebut harus dikembangkan melalui kelembagaan pemerintah, non pemerintah, dan media massa, dengan perkataan lain, sekolah dan semua unsur dalam masyarakat harus bekerja sama secara sinergis.

Pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dilihat dan diperlakukan hanya sebagai mata pelajaran di sekolah tetapi harus menjadi kegiatan pendidikan yang bersifat komprehensif dalam isi maupun penanganannya (Udin WP & Dasim Budimansyah, 2007: 3). Agar Visi PKn sebagaimana yang dicetuskan para *Asian Educational Leaders* bahwa PKn dalam era globalisasi perlu diarahkan pada pengembangan kualitas warga negara yang mencakup; *Spiritual devel-*

---

*opment, Sense of individual responsibility, Reflective and autonomous personality*, dapat diwujudkan.

Citizenship education merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut (Udin WP & Dasim 2007: Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah penting dan dengannya diharapkan dapat mengembangkan warga negara agar memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global; 2. Kemampuan bekerjasama dengan yang lain dengan cara yang koperatif dan menerima tanggung jawab atas peran tugasnya di dalam masyarakat; 3. Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya; 4. Kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis; 5. Keinginan menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan; 6. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan; 7. Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia (hak wanita, hak etnis minoritas dan lain-lain); 8. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional. (PKn & Masyarakat Multikultural:40)

Untuk maksud tersebut maka Kurikulum dan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) harus mengembangkan Visi; Globalization, Localication dan, *Individualization for multiple intelegence*. Yang berpusat pada pengembangan *Learning intellegence* dalam dimensi; *Social cultural, Polotical, Economic dan Technological intellegence*.

Pada saat kita menggunakan Kurikulum 1994 pembelajaran lebih mengarahkan peserta didik untuk menguasai materi pengetahuan. Materi pengetahuan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode belajar di kelas terutama digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Guru dalam posisi lebih banyak berceramah, sementara siswa mendengarkan, mencatat dan bertanya. Selebihnya diberi tugas (PR) untuk mengerjakan soal-soal. Evaluasi yang dilakukan masih menggunakan metode tes klasikal, pertanyaan-pertanyaan disusun dalam bentuk tes pilihan ganda, esei atau tes bentuk uraian. Untuk menjawab soal-soal tersebut, peserta didik belajar dengan jalan menghafal materi pelajaran yang telah disampaikan guru di kelas. Dengan jalan menghafal peserta didik lebih berpeluang mendapatkan nilai yang tinggi. Pola pembelajaran tersebut bisa menghasilkan peserta didik mampu menjawab pertanyaan, tetapi tidak mampu mengembangkan kompetensi peserta didik. Kompetensi yang dimaksud adalah sebagai kebulatan pe-

ngetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran (Budimansyah & Suryadi, 2008, 12-13).

Pengembangan Kurikulum 2004 menggunakan paradigman yang berbasis kompetensi, yang berkaitan dengan tuntutan standar kompetensi, organisasi pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mengembangkan dan menguasai kompetensi seefektif mungkin. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut; (1) berorientasi pada pencapaian hasil dan dampaknya (*outcome oriented*), (2) berbasis pada standart kompetensi dan kompetensi dasar, (3) bertolak dari kompetensi lulusan, (4) memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum yang berdifrensiasi (5) mengembangkan aspek belajar secara utuh dan menyeluruh (*holistik*), (6) menerapkan prinsip ketuntasan belajar (*mastery learning*)

Dengan menggunakan bahan dasar Kurikulum 2004, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengembangkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam menyusun KTSP. Dalam Standar Isi maupun Standar Kompetensi Lulusan inilah PPKn diubah namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, trampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran PKn bertujuan sebagai berikut: 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Budimansyah & Suryadi, 2008, 14-15).

Secara ontologikal Pendidikan kewarganegaraan memiliki dua dimensi, yakni obyek telaah dan obyek pengembangan (Winataputra, 2001). Obyek telaah adalah keseluruhan aspek idiil, instrumental, dan praksis PKn yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran PKn di sekolah dan di luar sekolah, serta format gerakan sosial-kultural kewarganegaraan masyarakat. Sedangkan obyek pengembangan atau sasaran pembentukan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik yang oleh Bloom dkk, dikategorikan ke dalam ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik,

yang menyangkut status, hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang perlu dimuliakan dan dikembangkan secara programatik guna mencapai kualitas warga negara yang “cerdas, dan baik” dalam arti religius, demokratis dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Yang dimaksud dengan aspek idiil PKn adalah landasan dan kerangka filosofis yang menjadi titik tolak dan sekaligus sebagai muaranya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang termasuk dalam aspek idiil PKn adalah landasan dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 UU No 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Aspek instrumental PKn adalah sarana programatik pendidikan yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan substansi aspek-aspek idiil. Yang termasuk ke dalam aspek ini adalah; kurikulum, bahan belajar, guru, media dan sumber belajar, alat penilaian belajar, ruang belajar dan lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan aspek praksis PKn adalah perwujudan nyata dari sarana programatik kependidikan yang kasat mata, yang pada hakekatnya merupakan penerapan konsep, prinsip, prosedur, nilai, dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai dimensi “poietike” yang berinteraksi dengan keyakinan, semangat, dan kemampuan para praktisi, serta konteks pendidikan kewarganegaraan, yang diikat oleh substansi idiil sebagai dimensi “pronesis” yakni *truth and justice*. Termasuk juga dalam aspek praksis ini adalah interaksi belajar di kelas dan atau di luar kelas, dan pergaulan sosial-budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memberi dampak edukatif kewarganegaraan. Pengembangan ketiga aspek tersebut dalam pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi atau kemampuan berupa pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis/reflektif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan membuat keputusan bernalar, dan keterampilan sosial.

Selanjutnya keseluruhan rangkaian proses dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada penciptaan warga negara Indonesia yang memiliki kepribadian; beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ( UU. No 20/2003) kecerdasan ruhiyah, kecerdasan naqliyah, kecerdasan emosional, kecerdasan menimbang (Sanusi, 1998), *civic responsibility, active civic participation* (NCSS, 1989), *good character, personal ethics and virtues* (Best, 1960).

Yang kesemua itu dapat direkonseptualisasi bahwa aspek kepribadian warga negara yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia yang berkua-

litas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Visi Pendidikan Nasional menurut UU No. 20/2003). Sejalan dengan visi tersebut Depdiknas berhasrat untuk tahun 2025 menghasilkan insan Indonesia “Cerdas Komprehensif dan Kompetitif”. Cerdas komprehensif dimaksud meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Cerdas spritual, yakni mampu beraktualisasi diri melalui oleh hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. 2. Cerdas emosional, yakni mampu beraktualisasi diri melalui oleh rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasitivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. 3. Cerdas sosial, yakni mampu beraktualisasi diri melalui interaksi sosial; membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik dan simpatik, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 4. Cerdas intelektual, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan aktualisasi insan itelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif. 5. Cerdas kinestetik, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, trampil dan trengginas, dan aktualisasi insan adiraga.

Sedangkan yang dimaksud dengan insan Indonesia yang kompetitif adalah insan yang memiliki seperangkat kompetensi sebagai berikut; berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat (Budimansyah & Suryadi, 2008, 22).

#### PENTINGNYAPKN

CEPS Sebuah jaringan penelitian Internasional yang dirancang untuk mengkaji; Perubahan Karakter Kewarganegaraan, yang diketuai Prof. DR. John Cogen (1998) menjelaskan bahwa; *a citizen* berarti anggota resmi suatu masyarakat, dan *citizenship* berarti seperangkat karakteristik sebagai seorang warga negara, sedangkan *citizenship education* berarti kontribusi atau dampak pendidikan terhadap pengembangan karakteristik yang menandai seorang warga negara. Selanjutnya dijelaskan sedikitnya terdapat lima atribut pokok atau ciri utama *citizenship/warga negara* yaitu, jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, serta pemilihan nilai-nilai dasar kemasyarakatan.

---

Kelima atribut tersebut harus dikembangkan melalui kelembagaan pemerintah, non pemerintah, dan media massa, dengan perkataan lain, sekolah dan semua unsur dalam masyarakat harus bekerja sama secara sinergis. 1. Pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dilihat dan diperlakukan hanya sebagai mata pelajaran di sekolah tetapi harus menjadi kegiatan pendidikan yang bersifat komprehensif dalam isi maupun penanganannya (Udin WP & Dasim Budimansyah, 2007: 3). Agar visi PKn sebagaimana yang dicetuskan para *Asian Educational Leaders* bahwa PKn dalam era globalisasi perlu diarahkan pada pengembangan kualitas warga negara yang mencakup; *Spiritual development, Sense of individual responsibility, Reflective and autonomous personality*, dapat diwujudkan. 2. *Citizenship education* merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara (Udin WP & Dasim 2007: 4). 3. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah penting dan dengannya diharapkan dapat mengembangkan warga negara agar memiliki karakteristik sebagai berikut; (1) Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global. (2) Kemampuan bekerjasama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran tugasnya di dalam masyarakat. (3) Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya. (4) Kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis. (5) Keinginan menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan. (6) Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan. (7) Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia (hak wanita, hak etnis minoritas dan lain-lain). (8) Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional (PKn & Masyarakat Multikultural:40). 4. PKn penting untuk membentuk karakter dan memperkuat kepribadian warga negara yang memiliki jati diri ke Indonesiaan, memiliki pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan untuk membangun diri, masyarakat bangsa dan negaranya.

#### PENDIDIKAN SEBAGAI SARANA MENUJU BANGSA YANG MANDIRI

Meningkatnya komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana utama menuju bangsa yang mandiri dan berdaya saing tinggi yang ditunjukkan melalui kebijakan pemerintah untuk merealisasikan amanat UUD 1945 (amandemen) Pasal 31 ayat 1-5, yang diikuti dengan kebijakan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk

sektor pendidikan, merupakan suatu langkah maju dan cerdas yang patut direspon, karena dengan begitu setidaknya bangsa Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah terus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan. Kita semua menyadari bahwa hanya melalui pendidikan bangsa kita menjadi maju dan dapat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, baik dalam bidang sains dan teknologi maupun ekonomi. Apapun persoalan bangsa yang dihadapi komitmen kita untuk melaksanakan pembangunan sesuai amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap dipegang. Komitmen ini direalisasikan dalam berbagai kebijakan dan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM demi tercapainya kemajuan bangsa dan negara di masa depan, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama (Sambutan Mendiknas).

Hal yang sama disampaikan Menteri Agama bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan per kapita, tetapi yang lebih mendasar lagi menyangkut kualitas manusianya. Hal ini tercermin dari makin tinggi tingkat pendidikan penduduk, makin tinggi tingkat kesehatan, makin tingginya tingkat pendapatan penduduk, serta makin meratanya distribusi hasil pembangunan. Pendidikan seharusnya diarahkan untuk membangun manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani, dan mental maupun spritual, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spritual, memiliki kecakapan, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah yang menjadi indikator dari kualitas SDM yang dibangun melalui pendidikan dalam rangka membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan berdaya saing tinggi. (Sambutan Menag dan Mendiknas dalam Mohammad Ali, 2009, Pendidikan Untuk pembangunan Nasional).

### **Kata Kunci/Komentar**

Pendidikan sebagai soko guru peningkatan SDM dan daya saing bangsa, menjadi salah satu program prioritas, dalam kondisi apa dan bagaimanapun pendidikan harus tetap dijalankan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai cita-cita bersama secara nasional.

### **Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan**

SDM berkualitas memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Mengingat pembangunan tidak hanya berdampak positif, seperti pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya kesejahteraan rakyat, tetapi

---

juga membawa dampak negatif seperti, kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi asas mamfaat dan sustainabil atau keseimbangan dan kesinambungan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kualitas SDM para pejabat pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan di lapangan.

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berarti pendidikan yang memperhatikan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan sebagai dimensi-dimensi yang independen dan saling berkaitan, yaitu masyarakat, budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam rangka mencapai peningkatan kualitas kehidupan. Ini merupakan suatu konsep yang dinamis dan juga merupakan upaya yang bersifat kolektif dalam menatap ke depan keadaan dunia tempat setiap orang dapat memperoleh keuntungan dari kesempatan memperoleh pendidikan, dan agar setiap orang dapat belajar tentang gaya hidup, perilaku, dan nilai-nilai yang penting bagi penciptaan masa depan yang berkelanjutan.

Dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 2005-2014 ditetapkan dengan tujuan; (1) Lebih mempromosikan pendidikan sebagai basis dari kehidupan masyarakat yang berkelanjutan dan memperkuat kerja sama internasional bagi pengembangan inovasi kebijakan, program dan pelaksanaan ESD. (2) Mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem pendidikan pada semua tingkatan pendidikan. (3) Menyediakan bantuan dan dukungan pendanaan bagi pendidikan, penelitian dan program kepedilian publik.

Untuk mengimplementasikannya, pemerintah di setiap negara dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatikan dimensi kemandirian lokal, yang terdiri atas; 1) Community oriented, pembangunan didasarkan pada kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat setempat. 2) Community based, pembangunan didasarkan pada sumber daya yang ada di dalam masyarakat setempat, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya kelembagaan ekonomi-sosial-politik, serta nilai-nilai yang mendukungnya. 3) Community managed, pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat setempat sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan dan emetikan hasil kegiatan, yang perlahan-lahan mengentaskan masyarakat setempat dari posisi sebagai obyek ke posisi sebagai subyek pembangunan (Mohammad Ali, 2009, Pendidikan Untuk pembangunan nasional, h.100-114).

### **Kata Kunci/Komentar**

Pendidikan, manusia berkualitas, pembangunan berkelanjutan, aspek budaya, SDM, SDA, dan nilai-moral, agar pembangunan bisa memberi mamfaat kepada masyarakat, bersandar pada SDM/SDA yang ada untuk menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

---

## Maksud dan Tujuan PKn

Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*.” Dalam konteks ini peran PKn bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokrasi pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk jabatan publik (Udin S. Winataputra & Dasim B. *Civic Education*, 2007, h.i).

## Tujuan PKn

Terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh tanggung jawab. Dalam urusan-urusan publik, diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual dan keterampilan berperan serta. Keterampilan ini pada gilirannya ditingkatkan lebih lanjut melalui Pengembangan watak yang dapat meningkatkan kemampuan individu. Warga negara berperan serta dalam proses politik, yang selanjutnya dapat mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat. Dengan demikian PKn berfokus pada tiga komponen dasar Pengembangan, yaitu; pengetahuan, keterampilan, dan watak atau Karakter kewarganegaraan (Udin S.W. & Dasim, 2007, h. 1).

## Rekomendasi CEPS

Perlunya pengembangan *Citizenship Education*, yang dikenal dengan “*multidimensional citizenship*.” Seorang warga negara seyogyanya memiliki lima karakter/ciri utama yaitu; jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan (Udin S. Winataputra & Dasim, 2007, h. 2).

Dengan demikian PKn harus dilihat sebagai kegiatan pendidikan yang bersifat komprehensif (isi maupun penanganannya), dalam mana sekolah dan semua unsur dalam masyarakat bekerja sama secara sinergis.

## PKn menurut SCAA

Lembaga Kajian *Internasioanl School Curriculum and Assessment Authority (SCAA)* adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengambil

---

peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut. (Udin S Winataputra & Dasim, 2007, h.4)

#### **Salah satu temuan SCAA**

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jati diri adalah; *“historical tradition, geographical position, socio-political structure, economic system, and global trends”*. Lembaga ini juga mengidentifikasi adanya PKn pada titik MINIMAL dan MAKSIMAL. Pada titik minimal PKn, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, hasilnya mudah diukur.

Sedangkan pada titik maksimal PKn, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan informal, diberi label *“citizenship education”*, menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar (Udin S.W. & Dasim, 2007, h. 5-6).

#### **Civics Education**

Menurut Cogen, *“Civics Education”* merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa. Sedangkan *“Citizenship Education”* merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Dari situ Cogen menyimpulkan bahwa *“Citizenship Education”* atau *“Education For Citizenship”* merupakan suatu konsep yang lebih luas di mana *“Civic Education”* termasuk bagian penting di dalamnya. (Udin S. Winataputra & Dasim, 2007, h. 10).

#### **Keterpaduan**

*“Citizenship Education”* dan *“Civic Education”* tidak bisa dipisahkan dari perkembangan pemikiran tentang *“Social studies/Social studies education”* karena; (1) *citizenship education dan civic education* sebagai bagian dari *social studies*, (2) *Citizenship education dan civic education* sebagai

---

esensi atau inti dari *social studies*. Sementara itu secara epistemologis, sesungguhnya “*social studies*” juga memiliki kaitan sangat erat dengan “*social sciences*”. Karena itu kedudukan dan keterkaitannya satu sama lain perlu dihami secara jelas.

(Udin S. Winataputra & Dasim, 2007, h. 11). Dalam konteks ini “*social studies*” disikapi sebagai perpaduan ilmu-ilmu sosial dan humaniora Untuk tujuan pembelajaran dalam rangka “*citizenship education*”. Jadi keduanya laksana benang dan gulungan.

Barber, dalam rangka mendefenisi ulang “*Citizenship for strong democracy*” Menekankan perlunya pengembangan “*action oriented citizens*” Yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan publik. Oleh karena itu setiap warga negara harus belajar bagaimana melibatkan diri dalam kegiatan politik atau perdebatan politik.

Menurut Bastian, sekolah seyogyanya mempersiapkan siswa untuk menerapkan pengetahuan, untuk memecahkan permasalahan, untuk membuat aneka pilihan, dan berpartisipasi dalam hal-hal yang prioritas. Hal itu diyakini akan meningkatkan kemampuan dan daya tahan mereka dalam menghadapi perubahan pasar kerja. Sekolah harus memberikan pendidikan citizenship buat siswa, karena ide demokrasi tidak akan diketahui secara instintif, tetapi harus diajarkan. (Udin S. Winataputra & Dasim, 2007, h. 11)

Ditegaskan oleh *the Lord Chancellor*, bahwa tidaklah mungkin dicapai suatu demokrasi Inggris yang sehat dan prospektif, kecuali dikembangkannya Inggris sebagai bangsa yang memiliki keterlibatan warga negara yang penuh. Olehnya itu ditegaskan bahwa “*Citizenship education must be education for citizenship*” (pendidikan kewarganegaraan haruslah menjadi pendidikan untuk membangun jati diri kewarganegaraan; dengan pusat perhatian pada tiga “*strands*” atau garapan, yakni; “*social moral responsibility, community involvement and polotical literacy* (pengembvangan tanggung jawab sosial dan moral, perlibatan kemasyarakatan, dan kemelekpoltikan). (Udin S. Winataputra & Dasim, 2007, h. 14-15).

### Tiga Tradisi Pedagogis

Pertama, “*social studies*” isinya menekankan pada esensi bahwa para siswa harus mendapatkan pengetahuan sebagai “*self-evident truth*” atau kebenaran yang diyakini sendiri, di sini tugas guru menyampaikan pengetahuan yang telah diyakini kebenarannya. Cara ini diyakini kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan. Kedua, “*social sciences*” bertujuan mengembangkan siswa agar dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan metode dari disiplin ilmu sosial sebagai sarana untuk menjadi warga negara yang epektif. (tekananya

---

bukan pada fakta tetapi pada metode kerja ahli ilmu sosial). Ketiga, “reflective inquiry” menekankan pada upaya melatih siswa agar dapat mengambil keputusan dalam konteks sosial politik, dengan asumsi bahwa demokrasi selalu menuntut warga negara untuk turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. (Udin S. Winataputra & Dasim, 2007, h. 17-18).

### **Lima Tujuan Utama “Social Studies” abad 21**

Yakni mengembangkan; (1) Civic responsibility and civic participation; (2) Perspective on their own life experiences so they see themselves as part of larger human adventure in time and place; (3) A critical understanding of the history, geography, economic, political, and social institutions, traditions, and values of the United States as expressed in both unity and diversity; (4) An understanding of other peoples and the unity and diversity of world history, geography, institutions, traditions, and values; (5) Critical attitudes and analytical perspective appropriate to analysis of human condition”. (Udin S. Winataputra & Dasim, 2007, h. 18).

### **PENUTUP**

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subyek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “nation and character building”. Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, ketrampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik.

Pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dilihat dan diperlakukan hanya sebagai mata pelajaran di sekolah tetapi harus menjadi kegiatan pendidikan yang bersifat komprehensif dalam isi maupun penanganannya. Agar Visi PKn sebagaimana yang dicetuskan para *Asian Educational Leaders* bahwa PKn dalam era globalisasi perlu diarahkan pada pengembangan kualitas warga negara yang mencakup; *Spiritual development, Sense of individual responsibility, Reflective and autonomous personality*, dapat diwujudkan.

Selanjutnya keseluruhan rangkaian proses dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada penciptaan warga negara Indonesia yang memiliki kepribadian; beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ( UU. No 20/2003) kecerdasan ruhiyah, kecerdasan naqliyah, kecerdasan emosional, kecerdasan menimbang

(Sanusi, 1998), *civic responsibility, active civic participation* (NCSS, 1989), *good character, personal ethics and virtues* (Best, 1960).

#### DAFTARRUJUKAN

- Budimansyah, Dasim ,2008, Pkn dan Masyarakat Multikultural , Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjan Universitas pendidikan Indonesia.
- Buwono X, S.H. (2007) Merajut Kembali Ke-Indonesia Kita . Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Cogan, John J. (1998). *Citizenship for the 21<sup>st</sup> Century : An Internasional Perspektive on Education*, London : Cogan Page
- Isin, EF & Turner, BS ,(2002). *Handbook of Citizebship Studies*. Sage Publications London
- Kalidjernih, Fk, (2009): Puspaa Ragam Konsep dn ISu Kewarganegaraan. Widya Aksara Press Bandung
- Sapriya dkk.2008. konsep Dasar PKn. Bandung: Laboratorium PKn PUI Bandung.
- Tilaar, H.A.R, (2007). Meng-Indonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektive Ilmu Pendidikan Jakarta : Rineka Cipta
- Ubaedillah, A. et. al.(2009) Pendidikan Kewarganegaraan(Civic Education) Demokrasi Ham dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Prenada Media Group
- Udin S. Winatapura da Dasim Budimansyah (2007) Civic Education: konteks, landasan, bahan ajar dan kultur kelas, Bandung : Prodi PKn SPS UPI
- Wuryan, S. Dan Syaifullah (2009). Ilmu Kewarganegaraan (Civics) Bandung: Lab.PKn UPI
- Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan . menyambut 70 tahun Prof.Drs.H.A. kosasih Djahiri, 2006, Editor, Dasim Budimansyah dan Syaifullah Syam, Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan
- (2003) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, Jakarta : Depdiknas